

## Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Nasrullah Hidayat<sup>1</sup> Munzir Phonna<sup>2</sup> Fitrah Maya Sari Hasugian<sup>3</sup> Maya Wulandari<sup>4</sup> Sarah Bakara<sup>5</sup> Tina Angelia<sup>6</sup>

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan,  
Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

Email: [nasrullah@unimed.ac.id](mailto:nasrullah@unimed.ac.id)<sup>1</sup> [munzir.phonna@gmail.com](mailto:munzir.phonna@gmail.com)<sup>2</sup>  
[fitrahmayasarihasugian@gmail.com](mailto:fitrahmayasarihasugian@gmail.com)<sup>3</sup> [wulandariimaya07@gmail.com](mailto:wulandariimaya07@gmail.com)<sup>4</sup>  
[sarahbakara27@gmail.com](mailto:sarahbakara27@gmail.com)<sup>5</sup> [tinaangelia07@gmail.com](mailto:tinaangelia07@gmail.com)<sup>6</sup>

### Abstrak

Bonus demografi merupakan kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif sehingga menciptakan peluang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi. Indonesia saat ini berada dalam fase bonus demografi dengan proporsi penduduk usia produktif mencapai 69,4 persen dan angka beban ketergantungan sebesar 44,05. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme bonus demografi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, mengidentifikasi tantangan struktural yang menghambat pemanfaatannya, serta merumuskan arah kebijakan yang diperlukan untuk mengoptimalkan peluang tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi literatur dengan memanfaatkan berbagai sumber ilmiah, laporan lembaga nasional maupun internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa bonus demografi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan jumlah tenaga kerja produktif, peningkatan tabungan masyarakat, dan akumulasi modal manusia. Namun, pemanfaatannya masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, dominasi sektor informal, pengangguran, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Pengalaman negara-negara Asia Timur menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan bonus demografi sangat bergantung pada investasi pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja produktif, dan reformasi kelembagaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan memperluas kesempatan kerja agar bonus demografi dapat menjadi pendorong utama menuju Indonesia Emas 2045.

**Kata Kunci:** bonus demografi, pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia, tenaga kerja, Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Salah satu perubahan paling mendasar yang pernah dialami umat manusia adalah transisi demografi sebuah proses di mana angka kelahiran dan kematian yang semula tinggi secara bertahap bergeser ke angka yang lebih rendah, sehingga komposisi usia penduduk suatu bangsa mengalami perombakan yang menyeluruh (Bloom, Canning, & Sevilla, 2003). Dampak perubahan ini terasa di berbagai penjuru dunia: Eropa Barat kini bergulat dengan populasi yang menua secara dramatis, sementara kawasan Asia Timur justru mampu menjadikan transisi serupa sebagai bahan bakar pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan sepanjang paruh kedua abad lalu. Indonesia kini menapaki fase yang sama namun penuh konsekuensi. Dengan jumlah penduduk sekitar 278,8 juta jiwa pada 2023 menjadikannya negara keempat terpadat di dunia Indonesia saat ini sedang berada dalam "jendela peluang" yang langka, yakni ketika kelompok usia produktif (15–64 tahun) mendominasi piramida kependudukan jauh melampaui kelompok yang tidak produktif. Dalam kondisi seperti ini, sebuah dividend demografis berpotensi lahir dan menjadi pendorong ekonomi yang dahsyat, asalkan didukung oleh tata kelola kebijakan yang cermat. Data BPS tahun 2023 mempertegas gambaran

menggembirakan tersebut. Angka Beban Ketergantungan Indonesia hanya berada di angka 44,05 per 100 penduduk usia produktif artinya beban tanggungan tergolong ringan, jauh di bawah ambang 50 yang lazim dijadikan penanda terbukanya jendela bonus demografi. Kelompok usia produktif sendiri menyumbang 69,4 persen dari keseluruhan populasi, sedangkan Angka Fertilitas Total (TFR) telah menyusut ke angka 2,18, hampir menyentuh batas reproduksi alami sebesar 2,1. BPS memproyeksikan puncak bonus demografi Indonesia akan terjadi antara 2030 dan 2035, ketika rasio ketergantungan mencapai titik terendahnya. Namun kondisi ini tidak akan bertahan selamanya. Seiring angka harapan hidup yang kini telah mencapai 73,5 tahun terus meningkat, kelompok lansia akan tumbuh semakin besar memasuki dekade 2040-an, dan jendela peluang pun perlahan akan menutup.

Pengalaman sejumlah negara yang telah lebih dulu memanen hasil bonus demografi memberikan pelajaran berharga. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Tiongkok membuktikan bahwa lompatan ekonomi mereka tidak terjadi begitu saja melainkan ditopang oleh meningkatnya tabungan masyarakat, membludaknya tenaga kerja produktif, serta investasi besar-besaran dalam pendidikan dan kesehatan (Mason & Lee, 2006). Dalam rentang waktu yang terbilang singkat, negara-negara "Macan Asia" itu berhasil melipatgandakan pendapatan per kapita mereka berkat pengelolaan dividend demografi yang terencana dan konsisten. Bagi Indonesia, kemendesakan untuk bertindak tidak bisa diabaikan. Para ahli memperkirakan waktu yang tersisa untuk mengoptimalkan keunggulan demografis ini hanya sekitar satu dekade lagi, sebelum gelombang penuaan penduduk mulai menggeser keseimbangan. Jika peluang ini terlewat, Indonesia berisiko terjebak dalam situasi yang oleh para ekonom disebut "tua sebelum kaya" (old before rich) nasib yang telah menimpa beberapa negara berkembang yang gagal mengelola transisi demografisnya secara tepat waktu. Namun, realitas menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mampu mengubah potensi demografis menjadi kemajuan ekonomi yang nyata. Tingkat pengangguran terbuka masih berada di angka 5,32 persen (BPS, 2023), sektor informal masih menguasai lebih dari separuh pasar tenaga kerja, dan kualitas SDM pun masih tertinggal hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baru mencapai 0,718, menempatkan Indonesia di kategori pembangunan manusia menengah yang belum mampu bersaing dengan negara-negara Asia yang lebih maju. Kondisi ini menegaskan bahwa bonus demografi bukanlah jaminan otomatis atas kemakmuran. Untuk mengubah potensi menjadi kenyataan, diperlukan prasyarat struktural dan kebijakan yang dipersiapkan secara matang dan menyeluruh. Penelitian ini berupaya menelaah secara sistematis bagaimana mekanisme, faktor penentu, serta arahan kebijakan yang relevan dapat dirumuskan guna memaksimalkan pemanfaatan bonus demografi di Indonesia.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Bonus Demografi dan Transisi Kependudukan**

Bonus demografi merujuk pada kondisi demografis di mana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh melampaui kelompok usia tidak produktif, yakni anak-anak dan lansia. Kondisi ini menciptakan apa yang oleh para ahli disebut sebagai "jendela peluang" (window of opportunity) bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Bloom, Canning, & Sevilla, 2003). Dalam kerangka teoritis, bonus demografi merupakan turunan langsung dari proses transisi demografi, yakni pergeseran dari pola fertilitas dan mortalitas yang tinggi menuju pola yang lebih rendah, sehingga komposisi usia penduduk mengalami perubahan struktural yang signifikan. Bloom et al. (2003) menegaskan bahwa manfaat ekonomi dari transisi demografis tidak datang secara otomatis, melainkan bergantung pada kemampuan suatu negara dalam menyiapkan fondasi kebijakan yang memadai khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan

penciptaan lapangan kerja. Studi mereka yang berbasis lintas negara menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari keajaiban ekonomi Asia Timur sepanjang 1965-1990 dapat dijelaskan oleh perubahan struktur usia penduduk, bukan semata-mata oleh faktor akumulasi modal atau kemajuan teknologi. Temuan ini menjadi salah satu landasan paling berpengaruh dalam diskusi akademis mengenai keterkaitan antara demografi dan pembangunan ekonomi. Pada Williamson (2013) dalam kajiannya tentang “demographic dividend revisited” memperluas pemahaman tersebut dengan menyatakan bahwa manfaat bonus demografi tidak hanya bersumber dari peningkatan partisipasi angkatan kerja, tetapi juga dari efek jangka panjang berupa pendalaman investasi modal fisik dan manusia, peningkatan tabungan rumah tangga, serta arus masuk modal asing yang dipicu oleh struktur demografi yang lebih muda. Hal ini sejalan dengan model life-cycle savings yang menunjukkan bahwa kelompok usia produktif cenderung menabung lebih banyak dibanding kelompok dependen, sehingga ketersediaan modal untuk investasi produktif meningkat secara agregat.

### **Dividend Demografi Pertama dan Kedua**

Dalam literatur ekonomi kependudukan, Mason & Lee (2006) memperkenalkan konsep yang membedakan dua jenis dividend demografis. Dividend pertama bersifat transitoris dan terjadi ketika angkatan kerja yang besar memasuki pasar tenaga kerja, meningkatkan rasio support (perbandingan tenaga kerja efektif terhadap jumlah penduduk), sehingga mendorong pertumbuhan pendapatan per kapita dalam jangka menengah. Sementara itu, dividend kedua bersifat lebih permanen dan timbul manakala generasi produktif yang semakin matang mulai menabung secara intensif untuk membiayai masa pensiun mereka yang semakin panjang seiring meningkatnya harapan hidup. Akumulasi tabungan inilah yang kemudian bertransformasi menjadi investasi jangka panjang, memperdalam stok kapital nasional, dan mendorong produktivitas total faktor. World Bank (2019) menekankan bahwa untuk menangkap dividend pertama, tiga syarat utama harus dipenuhi secara bersamaan:

1. Transisi demografi harus diakselerasi melalui kebijakan kesehatan reproduksi.
2. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan secara substansial.
3. Reformasi pasar tenaga kerja dan fiskal harus dilakukan agar angkatan kerja yang membengkak dapat terserap ke dalam pekerjaan yang produktif dan layak.

Tanpa ketiga prasyarat tersebut, lonjakan penduduk usia produktif justru dapat berubah menjadi beban struktural berupa pengangguran massal dan tekanan sosial yang menekan laju pertumbuhan ekonomi.

### **Pengalaman Negara-Negara Asia Timur dan Relevansinya bagi Indonesia**

Pengalaman empiris negara-negara Asia Timur menjadi cermin paling nyata tentang bagaimana bonus demografi dapat dimanfaatkan sebagai mesin pertumbuhan. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Tiongkok berhasil melipatgandakan pendapatan per kapita mereka dalam waktu yang relatif singkat karena mampu mengelola transisi demografis dengan kebijakan yang terkoordinasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekspansi industri (Mason & Lee, 2006). Tidak ada satu pun dari keberhasilan tersebut yang terjadi tanpa intervensi kebijakan yang disengaja dan berkelanjutan. Purwati & Prasetyanto (2022) dalam kajian mereka terhadap data Indonesia menemukan bahwa bonus demografi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, utamanya melalui jalur peningkatan output tenaga kerja dan ekspansi konsumsi domestik. Senada dengan itu, Nainggolan & Budiman (2024) mengungkapkan bahwa potensi pertumbuhan Indonesia melalui bonus demografi dapat terealisasi secara optimal apabila diiringi oleh peningkatan kualitas sumber

daya manusia, perluasan akses terhadap modal, serta reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada penyerapan angkatan kerja muda. Sebaliknya, kegagalan mengelola potensi ini berisiko mendorong Indonesia ke dalam jebakan pengangguran struktural dan aging population dini kondisi yang oleh para ekonom sering disebut sebagai “tua sebelum kaya.” Qomariyah et al. (2023) memperkuat argumen tersebut dengan menganalisis peluang dan tantangan bonus demografi Indonesia menjelang 2045. Mereka menyoroti bahwa meskipun secara kuantitas angkatan kerja Indonesia sangat besar, kualitasnya masih tertinggal dalam hal penguasaan teknologi dan keterampilan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan industri modern. Temuan ini sejalan dengan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang masih berada di kategori menengah, mencerminkan pekerjaan rumah yang belum tuntas dalam investasi modal manusia.

### **Peran Investasi Sumber Daya Manusia dalam Memaksimalkan Bonus Demografi**

Dalam teori pertumbuhan endogen, modal manusia (human capital) ditempatkan sebagai penggerak utama inovasi dan produktivitas jangka panjang. Pendidikan bukan sekadar investasi sosial, melainkan investasi ekonomi yang menghasilkan eksternalitas positif berupa peningkatan kapasitas inovatif dan daya saing tenaga kerja secara agregat (Hardianto, 2021). Bagi Indonesia, relevansi teori ini sangat tinggi: kualitas SDM menjadi penentu apakah ledakan penduduk usia produktif akan berubah menjadi keunggulan komparatif atau justru beban sosial. Harvard Ministerial Leadership Program (2020) merangkum tiga pilar utama yang menentukan keberhasilan konversi bonus demografi menjadi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Pasokan tenaga kerja yang meningkat seiring bertambahnya penduduk usia kerja dan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja
2. Tabungan personal yang terdorong naik karena berkurangnya beban pengasuhan anak
3. Akumulasi modal manusia yang diperkuat melalui pendidikan berkualitas dalam keluarga yang lebih kecil.

Ketiga pilar ini saling mengunci kelemahan pada satu pilar akan secara signifikan melemahkan efek dari pilar lainnya. Azzahra & Kurniawan (2023) secara khusus menyoroti pentingnya keterkaitan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja (link-and-match) sebagai strategi konkret dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Mereka berargumen bahwa ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri (skills mismatch) merupakan salah satu faktor struktural yang paling menghambat Indonesia dalam memanen dividend demografis secara penuh. Perluasan akses terhadap pendidikan teknis dan vokasional, dikombinasikan dengan program pelatihan berbasis industri, dinilai sebagai intervensi kebijakan yang paling efisien dalam jangka menengah.

### **Tantangan Struktural: Pasar Tenaga Kerja, Sektor Informal, dan Ketimpangan**

Salah satu tantangan paling mendasar yang dihadapi Indonesia dalam konteks pemanfaatan bonus demografi adalah dominasi sektor informal dalam struktur ketenagakerjaan nasional. Sektor ini yang masih menampung lebih dari separuh angkatan kerja Indonesia dicirikan oleh produktivitas rendah, ketiadaan perlindungan sosial, dan minimnya kesempatan peningkatan keterampilan (upskilling). Kondisi ini membuat sebagian besar potensi produktif angkatan kerja terperangkap dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah rendah dan tidak berkontribusi optimal pada pertumbuhan PDB secara agregat (Sagara, Setiawan, & Almuzafir, 2025). Pada penelitian Achmad et al. (2024) melalui analisis ekonometrik terhadap negara-negara berkembang menemukan bahwa hubungan antara struktur demografi dan pertumbuhan ekonomi bersifat kondisional: negara-negara yang

berhasil mentransformasi bonus demografis menjadi pertumbuhan adalah mereka yang memiliki institusi pasar tenaga kerja yang fleksibel, tingkat keterbukaan perdagangan yang tinggi, serta infrastruktur pendukung yang memadai. Sebaliknya, negara-negara dengan kelemahan struktural di bidang tata kelola dan institusi ekonomi justru mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan ketika rasio ketergantungan menurun, karena manfaat pertumbuhan hanya dinikmati oleh segmen ekonomi formal yang relatif kecil. United Nations Department of Economic and Social Affairs/DESA (2022) menekankan bahwa tanpa dorongan produktivitas tenaga kerja yang signifikan, manfaat ekonomi dari membanjirnya tenaga kerja muda tidak akan terwujud dalam skala yang dibutuhkan. Laporan tersebut menyoroti urgensi bagi negara-negara berkembang yang berada dalam fase bonus demografi untuk segera meningkatkan investasi dalam pendidikan teknis, memperluas konektivitas digital, dan mendorong formalisasi sektor informal agar gelombang angkatan kerja muda dapat diserap secara produktif sebelum “jendela peluang” menutup.

### **Proyeksi Bonus Demografi Indonesia dan Implikasi Kebijakan**

Badan Pusat Statistik (2023) mencatat bahwa angka beban ketergantungan Indonesia saat ini berada di level 44,05 per 100 penduduk usia produktif, jauh di bawah ambang 50 yang lazim dijadikan penanda terbukanya jendela bonus demografi. Data ini mengonfirmasi bahwa Indonesia sedang berada di fase puncak peluang demografis, dengan kelompok usia produktif menyumbang 69,4 persen dari total populasi dan Total Fertility Rate yang telah turun ke angka 2,18. Proyeksi BPS menempatkan puncak bonus demografi pada rentang 2030-2035, memberi Indonesia sekitar satu dekade untuk menyiapkan fondasi kebijakan yang matang. Satyahadewi, Amir, & Hendrianto (2023) dalam proyeksi mereka terhadap peningkatan perekonomian melalui pemanfaatan bonus demografi 2040 menyimpulkan bahwa optimalisasi peluang ini membutuhkan sinergi kebijakan lintas sektor yang mencakup penguatan sistem pendidikan, perluasan akses layanan kesehatan dasar, dan penataan regulasi investasi yang kondusif. Mereka juga mengingatkan bahwa tanpa perencanaan kependudukan yang terstruktur, Indonesia berisiko mewarisi persoalan aging population yang berat memasuki paruh kedua abad ini sebuah tantangan yang jauh lebih sulit diatasi dibanding tantangan saat ini. UNFPA (2022) dalam laporan kependudukan dunianya menegaskan bahwa keterkaitan antara bonus demografi, kesehatan reproduksi, dan pertumbuhan ekonomi bersifat mutual: negara yang berhasil menurunkan angka fertilitas secara sukarela melalui akses layanan kesehatan reproduksi yang luas, pada akhirnya juga menuai manfaat demografis yang lebih besar dan lebih merata. Dalam konteks Indonesia, hal ini menguatkan argumentasi bahwa kebijakan kesehatan dan kependudukan bukan sekadar agenda sosial, melainkan prasyarat ekonomi yang tak bisa diabaikan dalam strategi pembangunan nasional jangka panjang.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan kualitatif melalui studi literatur memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman yang komprehensif berdasarkan akumulasi pengetahuan ilmiah yang telah ada, tanpa terbatas pada satu sudut pandang disiplin tertentu (Moleong, 2017). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah yang telah tersedia. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan basis data akademik. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) secara kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Bonus Demografi sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi**

Bonus demografi bekerja melalui dua mekanisme utama yang saling melengkapi. Mekanisme pertama adalah dividend demografis pertama, yang terjadi ketika membanjirnya penduduk usia produktif ke pasar tenaga kerja secara langsung meningkatkan rasio support ekonomi, yakni perbandingan antara jumlah tenaga kerja efektif terhadap total penduduk. Kondisi ini menekan beban ketergantungan dan meningkatkan pendapatan per kapita secara agregat karena proporsi penduduk yang menghasilkan output jauh lebih besar dibanding yang mengonsumsi tanpa berkontribusi pada produksi (Mason & Lee, 2006). Data BPS (2023) mengkonfirmasi bahwa Indonesia saat ini berada persis pada fase ini, dengan Angka Beban Ketergantungan hanya 44,05 per 100 penduduk produktif dan kelompok usia 15–64 tahun menyumbang 69,4 persen dari total populasi. Mekanisme kedua adalah dividend demografis kedua yang bersifat lebih permanen dan berjangka panjang. Ketika generasi produktif mulai merencanakan masa pensiun yang lebih panjang seiring meningkatnya angka harapan hidup, tingkat tabungan rumah tangga cenderung meningkat secara signifikan. Akumulasi tabungan yang besar ini kemudian bertransformasi menjadi investasi produktif, memperdalam stok kapital nasional, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan produktivitas total faktor. Williamson (2013) menegaskan bahwa dividend kedua ini justru berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih substansial dan bertahan lebih lama dibanding dividend pertama, asalkan sistem keuangan dan lembaga pengelola investasi nasional beroperasi secara efisien.

### **Kondisi Terkini dan Potensi Bonus Demografi Indonesia**

Indonesia saat ini berada dalam salah satu momentum demografis paling strategis dalam sejarahnya. Dengan Total Fertility Rate yang telah turun ke angka 2,18 mendekati batas reproduksi alami 2,1 dan angka harapan hidup yang telah mencapai 73,5 tahun, struktur penduduk Indonesia kini menunjukkan karakteristik yang sangat kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. BPS (2023) memproyeksikan puncak bonus demografi akan terjadi antara 2030 dan 2035, ketika rasio ketergantungan mencapai titik terendahnya. Artinya, Indonesia masih memiliki waktu sekitar satu dekade untuk memaksimalkan kondisi demografis ini sebelum gelombang penuaan penduduk mulai menggeser keseimbangan struktural. Potensi ekonomi dari kondisi ini sangat besar, Purwati & Prasetyanto (2022) menemukan bahwa bonus demografi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama melalui jalur peningkatan output tenaga kerja dan ekspansi konsumsi domestik. Apabila potensi ini berhasil dioptimalkan sepenuhnya, Indonesia memiliki peluang nyata untuk melompat ke status negara berpendapatan tinggi sebelum 2045, selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045. Studi komparatif terhadap negara-negara Asia Timur menunjukkan bahwa transisi demografis yang dikelola dengan baik mampu berkontribusi hingga sepertiga dari total pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam periode tertentu (Bloom, Canning, & Sevilla, 2003).

### **Tantangan Struktural yang Menghambat Realisasi Bonus Demografi**

Meskipun potensi demografis Indonesia sangat menjanjikan, realitas menunjukkan adanya sejumlah hambatan struktural yang belum terselesaikan. Pertama, kualitas sumber daya manusia masih menjadi titik lemah yang krusial. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang baru mencapai 0,718 menempatkan negeri ini di kategori pembangunan menengah, jauh tertinggal dibanding Korea Selatan (0,929) dan Singapura (0,939) yang telah lebih dahulu sukses memanen dividend demografisnya. Qomariyah et al. (2023) mengingatkan bahwa meskipun secara kuantitas angkatan kerja Indonesia sangat besar, kualitas penguasaan

teknologi dan keterampilan vokasional masih tertinggal dari kebutuhan industri modern, menciptakan skills mismatch yang signifikan di pasar tenaga kerja. Kedua, dominasi sektor informal dalam struktur ketenagakerjaan nasional menjadi hambatan serius bagi produktivitas ekonomi secara agregat. Lebih dari separuh angkatan kerja Indonesia masih terserap di sektor informal yang dicirikan oleh produktivitas rendah, ketiadaan perlindungan sosial, dan minimnya akses terhadap program peningkatan keterampilan. Sagara et al. (2025) menunjukkan bahwa kondisi ini membuat sebagian besar potensi produktif angkatan kerja terperangkap dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah rendah yang tidak berkontribusi optimal pada pertumbuhan PDB secara agregat. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka yang masih berada di angka 5,32 persen (BPS, 2023) mencerminkan belum optimalnya penyerapan angkatan kerja muda ke dalam lapangan kerja yang produktif dan layak. Ketiga, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi antara kawasan dan segmen sosial menjadi ancaman nyata. Achmad et al. (2024) menemukan bahwa di negara-negara berkembang dengan kelemahan institusional, penurunan rasio ketergantungan justru sering kali disertai dengan peningkatan ketimpangan pendapatan, karena manfaat pertumbuhan hanya dinikmati oleh segmen ekonomi formal yang relatif kecil. Indonesia, dengan kesenjangan pembangunan yang masih lebar antara Jawa dan luar Jawa, serta antara kawasan perkotaan dan pedesaan, menghadapi risiko serupa apabila tidak ada intervensi kebijakan redistribusi yang terencana dan konsisten.

### **Pelajaran dari Negara-Negara Asia Timur dan Implikasinya bagi Indonesia**

Pengalaman negara-negara Asia Timur memberikan peta jalan yang kaya akan pelajaran bagi Indonesia. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Tiongkok berhasil memanfaatkan bonus demografi mereka melalui tiga strategi besar yang saling sinergis: investasi besar-besaran dalam pendidikan dan kesehatan, ekspansi industri manufaktur berorientasi ekspor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah masif, serta kebijakan tabungan nasional yang mendorong akumulasi kapital dalam negeri (Mason & Lee, 2006). Korea Selatan, misalnya, berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah dari di bawah 30 persen pada 1960 menjadi hampir universal pada 1980-an, sehingga ketika gelombang penduduk produktif memasuki pasar kerja, mereka telah dilengkapi dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri modern. Nainggolan & Budiman (2024) menegaskan bahwa potensi pertumbuhan Indonesia melalui bonus demografi dapat terealisasi secara optimal apabila diiringi oleh peningkatan kualitas SDM, perluasan akses terhadap modal, serta reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada penyerapan angkatan kerja muda. Hal yang membedakan Indonesia dengan negara-negara Asia Timur yang sukses adalah bahwa mereka memulai investasi pendidikan dan kesehatan secara masif justru sebelum puncak bonus demografi tiba, bukan setelah atau bersamaan. Indonesia, yang puncak bonus demografinya baru akan terjadi pada 2030–2035, masih memiliki waktu, namun jendela kebijakan tersebut terus menyempit seiring berjalannya waktu.

### **Rekomendasi Kebijakan untuk Memaksimalkan Bonus Demografi Indonesia**

Berdasarkan sintesis literatur yang telah dilakukan, terdapat beberapa arahan kebijakan yang dinilai paling kritis untuk memaksimalkan bonus demografi Indonesia. Pertama, percepatan investasi dalam pendidikan berkualitas, khususnya pendidikan vokasi dan teknis yang selaras dengan kebutuhan industri. Azzahra & Kurniawan (2023) menekankan bahwa strategi link-and-match antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan pasar kerja merupakan intervensi kebijakan yang paling efisien dalam jangka menengah untuk mengatasi skills mismatch yang menjadi penghambat utama produktivitas tenaga kerja Indonesia. Kedua,

penguatan sistem kesehatan dan layanan kesehatan reproduksi sebagai fondasi produktivitas jangka panjang. UNFPA (2022) menegaskan bahwa keterkaitan antara bonus demografi, kesehatan reproduksi, dan pertumbuhan ekonomi bersifat mutual: negara yang mampu menurunkan angka fertilitas secara sukarela melalui layanan kesehatan reproduksi yang luas pada akhirnya juga menuai manfaat demografis yang lebih besar dan lebih merata. Investasi dalam kesehatan ibu dan anak sejak dini juga terbukti menghasilkan eksternalitas positif berupa peningkatan kapasitas kognitif dan produktivitas generasi berikutnya, sejalan dengan argumen Harvard Ministerial Leadership Program (2020) tentang tiga pilar konversi bonus demografi. Ketiga, reformasi pasar tenaga kerja yang mendorong formalisasi sektor informal dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi penciptaan lapangan kerja produktif. World Bank (2019) menegaskan bahwa reformasi pasar tenaga kerja dan fiskal merupakan salah satu dari tiga syarat utama yang harus dipenuhi secara bersamaan untuk menangkap dividend demografis pertama. Kebijakan ini perlu didukung oleh perluasan infrastruktur digital dan konektivitas yang merata, mengingat UN DESA (2022) menyoroti bahwa ekspansi digital merupakan salah satu jalur terpenting bagi negara berkembang untuk menyerap angkatan kerja muda secara produktif di era ekonomi berbasis pengetahuan. Satyahadewi et al. (2023) menambahkan bahwa optimalisasi ini membutuhkan sinergi lintas sektor dan perencanaan kependudukan yang terstruktur untuk memastikan Indonesia tidak mewarisi persoalan aging population yang berat memasuki paruh kedua abad ini.

## **KESIMPULAN**

Bonus demografi merupakan peluang strategis yang dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia apabila dikelola secara tepat. Kondisi tingginya proporsi penduduk usia produktif memberikan potensi peningkatan output ekonomi, produktivitas tenaga kerja, tabungan masyarakat, serta investasi yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan pendapatan per kapita. Indonesia saat ini berada dalam fase bonus demografi dan diproyeksikan mencapai puncaknya pada periode 2030–2035, sehingga memiliki kesempatan yang terbatas untuk memaksimalkan manfaat dari perubahan struktur penduduk tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa bonus demografi tidak secara otomatis menghasilkan kemajuan ekonomi. Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kemampuan pasar tenaga kerja menyerap angkatan kerja produktif, tingkat produktivitas ekonomi, serta efektivitas kebijakan pemerintah. Tantangan utama yang masih dihadapi Indonesia meliputi rendahnya kualitas keterampilan tenaga kerja, dominasi sektor informal, pengangguran, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Pengalaman negara-negara Asia Timur membuktikan bahwa investasi yang konsisten pada pendidikan, kesehatan, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja produktif merupakan faktor penting dalam mengubah bonus demografi menjadi keuntungan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi akan sangat menentukan kemampuan negara untuk mencapai target pembangunan dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

## **Saran**

Berdasarkan hasil kajian, pemerintah perlu memanfaatkan momentum bonus demografi melalui kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat akses dan mutu pendidikan, khususnya pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, peningkatan kualitas layanan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, serta perbaikan gizi masyarakat perlu menjadi prioritas untuk menghasilkan

tenaga kerja yang sehat dan produktif. Di sisi lain, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas harus terus didorong melalui pengembangan sektor industri, ekonomi digital, dan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Reformasi pasar tenaga kerja juga diperlukan untuk mengurangi dominasi sektor informal dan meningkatkan produktivitas nasional. Pemerintah perlu memastikan pemerataan pembangunan antarwilayah agar manfaat bonus demografi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, D., Suryanto, T., & Handayani, R. (2024). Struktur demografi dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang: Sebuah analisis ekonometrik. *Jurnal Ekonomi dan Populasi*, 10(2), 110–127.
- Azzahra, N. F., & Kurniawan, B. (2023). Pendidikan vokasi dan link-and-match dalam menjawab tantangan pasar kerja. *Jurnal Pendidikan dan Ketenagakerjaan*, 11(3), 142–158.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). *The demographic dividend: A new perspective on the economic consequences of population change*. RAND Corporation.
- Hardianto. (2021). Investasi sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 13(1), 45–57.
- Harvard Ministerial Leadership Program. (2020). *Achieving the demographic dividend*. Harvard University.
- Mason, A., & Lee, R. (2006). Reform and support systems for the elderly in developing countries: Capturing the second demographic dividend. *GENUS*, 62(2), 11–35.
- Nainggolan, F. A., & Budiman, M. A. (2024). Analisis potensi dan resiko bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, 6(2), 95–104.
- Purwati, W. D., & Prasetyanto, P. K. (2022). Analisis pengaruh bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *JURNAL ECONOMINA*, 1(3).
- Qomariyah, N., Ningtyas, J. D. A., Tamara, K., & Ismanto, K. (2023). Analisis peluang dan tantangan adanya bonus demografi di tahun 2045 terhadap perekonomian Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1).
- Sagara, R., Setiawan, A. H., Almuzafir, & Purnawan, E. (2025). Dinamika kependudukan dan ketenagakerjaan: Tantangan dan kebijakan berkelanjutan untuk Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(1), 317–329.
- Satyahadewi, N., Amir, A., & Hendrianto, E. (2023). Proyeksi peningkatan perekonomian melalui pemanfaatan bonus demografi 2040. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 6(2), 715–725.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2022). *Frontier technology issues: Harnessing the economic dividends from demographic change*. UN DESA Policy Brief.
- United Nations Population Fund. (2022). *State of world population 2022: Seeing the unseen – The case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy*. UNFPA.
- Williamson, J. G. (2013). Demographic dividends revisited. *Asian Development Review*, 30(2), 1–25.
- World Bank. (2019). *Demographic dividend: Operational tool for pre-dividend countries*. World Bank Group.